



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XXXIII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025





PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 2025

PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



satpolpp.batam.go.id



[satpolppkotabatamkepri](https://www.instagram.com/satpolppkotabatamkepri)



[Satpol PP KOTA BATAM](https://www.facebook.com/SatpolPPKOTABATAM)



[Satpol PP Kota Batam](https://www.youtube.com/SatpolPPKotaBatam)

Jalan Brigjen Katamso, No. 1 Kecamatan Sagulung - Batam, Kode Pos 29439

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

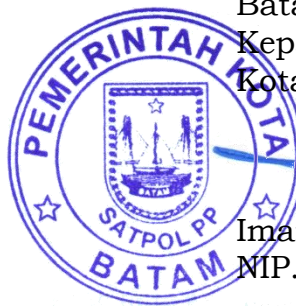
Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 30 Juni 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam



Imam Tohari, S.H.M.H
NIP. 19730510 200701 1 033

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025..... 5

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 14

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....18

BAB IV PENUTUP 31

4.1 Catatan Penting 31

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan..... 31

4.3 Rencana Tindak Lanjut..... 31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan II/Juni Tahun 2025 Kota Batam 7

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun
2025 s/d triwulan II (Bulan Juni 2025) 13

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025)..... 20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 7/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan

- Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 550);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
 12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman; Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1381);
 14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1605)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 (Bulan Juni 2025)

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 (Bulan Juni 2025)

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Mebel tidak tercapai sesuai target karena adanya perbedaan volume di RKA dengan RKBMD, Target di dalam RKA ada 72 Unit sedangkan di RKBMD 64 Unit.
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya tidak tercapai karena Peralatan yang terealisasi baru 4 Unit tingkat capaian 25%, dari target 16 Unit.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mencapai target 97.50%
 - 2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan mencapai 100%
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mencapai target 100%
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mencapai 100%
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan mencapai 100%
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50%
 - 3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Mencapai target 12.58%
 - 4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mencapai 50%

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mencapai 50%
 - 5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mencapai 100%
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mencapai 100%
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Mencapai 50%
 - A. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota mencapai target 100%
 - b. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Mencapai Target 50%
 - c. Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Mencapai Target 50%
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Mencapai 100%
 - 2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Mencapai 57.14%
- 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya, yang awal target 3 orang menjadi 111 orang dan sudah terealisasi 108 orang, sehingga untuk target melebihi kinerja yang direncanakan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan II (Bulan Juni 2025)

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
01	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	100%		
01	05	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	35.06%	35.06%
01	05	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	601 orang/bulan	586 Orang/bulan	97.50%
01	05	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 dokumen	0
01	05	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	3.600%	3.600%
01	05	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	0%
01	05	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	108 Orang	3.600%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
01	05	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	31.69%	31.69%
01	05	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
01	05	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100%
01	05	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	0
01	05	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
01	05	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
01	05	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50%
01	05	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	0,4%	0,4%
01	05	01	2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	0
01	05	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	72 Unit	21 Unit	12.58
01	05	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	4	25%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
01	05	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	50%	50%
01	05	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
01	05	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
01	05	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100%	18.35%	18.35%
01	05	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
01	05	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	100%
01	05	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	16 Unit	50%
01	05	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	0
01	05	02				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1. Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	26,34%
							2. Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
							3. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	
01	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang Ditangani	100%	100%	0,20%
							2. Persentase Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	100%	100%	100%
							3. Persentase Polisi Pamong Praja yang memenuhi standard kualifikasi (115/181*100)	87%	63.54%	63.54%
							4. Warga Negara yang memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Treantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	4 Laporan	4 Laporan	100%
							5. Persentase Jenis Sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	100%	100%
01	05	02	2	01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
01	05	02	2	01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	0	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
01	05	02	2	01	0006	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0	0	0
01	05	02	2	01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	0	0
01	05	02	2	01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	2 Orang	0	0
01	05	02	2	01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Orang	0	0
01	05	02	2	01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 Laporan	6 Laporan	50%
01	05	02	2	01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	6 Laporan	50%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
01	05	02	2	01	0017	Penyediaan Layanan dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	6 Laporan	50%
01	05	02	2	01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	9 Unit	9 Unit	100%
01	05	02	2	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda yang Ditindaklanjuti	100%	50.53%	50.53%
01	05	02	2	02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7 Laporan	0	0
01	05	02	2	02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	3 Laporan	0	0
01	05	02	2	02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14 Laporan	8 Laporan	57.14%
01	05	02	2	03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	7.28%	7.69%	7.69%
01	05	02	2	03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	1 Laporan	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan daerah adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengukur hasil dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memahami seberapa baik pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat melalui berbagai layanan yang diberikan.

Untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dalam Renstra Tahun 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 2 (dua program) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berikut ini adalah pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 Triwulan II, yang capaian realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dari semua indikator mencapai 50%.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Indeks	88	Indeks	83.59	
2.	Persentase penurunan pelanggaran Trantibum	Persentase	20%	Persentase	47.59	
3.	Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	20%	Persentase	61.64	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan Isu Strategis Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 sebagai berikut :

PERMASALAHAN DAERAH	ISU STRATEGIS
1	2
Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing	Peluang investasi global dalam upaya percepatan transformasi inklusi ekonomi berkelanjutan
Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Pengembangan Wilayah untuk mengurangi disparitas pembangunan

	wilayah dan menjamin pemerataan pembangunan (ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dasar, dan Kebutuhan dasar lainnya) berbasis penyelarasan pemanfaatan ruang
	Keterbatasan akses telekomunikasi karena masih adanya ketimpangan infrastruktur dan regulasi
Belum Optimalnya Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Masyarakat yang Merata dan Berkualitas	Pemerataan Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat
Belum Optimalnya Kualitas SDM Kota Batam	Optimalisasi Bonus Demografi melalui Peningkatan Kualitas SDM sebagai Penguatan Fondasi Pembangunan
Belum Optimalnya penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Reformasi birokrasi mewujudkan Good Governance
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Pengelolaan Sampah tanpa ada pengelolaan lanjutan
	Bencana akibat human error dan aktivitas pembangunan
Belum Optimalnya Upaya Pelestarian Nilai Kebudayaan, Norma, dan Pembangunan Berbasis Gender	Meningkatnya dampak negatif arus informasi di era digital pada karakter dan norma di masyarakat

Isu Strategis Perubahan RKPD Kota Batam secara keseluruhan masuk ke dalam permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, karena semuanya berkaitan dengan Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

isu-isu penting dalam pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah :

- 1) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Efektivitas penegakan seringkali menjadi sorotan, tantangannya meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, resistensi terhadap penertiban, potensi konflik sosial, dan keterbatasan sumber daya Satpol PP. Pentingnya Penegakan Perda dan Perkada adalah fungsi utama Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan kewibawaan pemerintah daerah.
- 2) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Menjaga ketertiban di ruang public dan melaksanakan deteksi dini, mengatasi pedagang kaki lima (PKL) ilegal, gelandangan dan pengemis (PMKS), Wanita Tuna susila (WTS) serta gangguan ketertiban lainnya seringkali menimbulkan gesekan dan memerlukan pendekatan yang humanis namun tegas. Kondisi tertib dan tenteram adalah prasyarat bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang kondusif.

- 3) Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
Peran Satpol PP dalam membantu penanganan bencana, evakuasi, dan pengamanan kegiatan masyarakat seringkali kurang optimal atau kurang terkoordinasi dengan instansi lain. Satpol PP memiliki potensi besar sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dalam berbagai situasi, namun untuk di Kota Batam saat ini belum adanya Satlinmas yang membantu dilingkungan Masyarakat terkait anggaran dalam pengukuhan Satlinmas di Kota Batam.
- 4) Pelayanan yang Humanis dan Profesional
Citra Satpol PP terkadang dinilai kurang humanis atau bahkan represif di lapangan, peningkatan profesionalisme, pemahaman hak asasi manusia, dan kemampuan komunikasi yang baik menjadi krusial. Maka dengan itu Pelayanan yang humanis dan profesional akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Satpol PP.
- 5) Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi Lain
Kurangnya koordinasi dengan kepolisian, dinas sosial, Dinas Vertikal dan instansi terkait lainnya dapat menghambat efektivitas penegakan dan pelayanan. Sinergi yang baik akan memperkuat pelaksanaan tugas dan menghindari tumpang tindih kewenangan.
- 6) Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kurangnya pelatihan yang memadai, dan rendahnya kesejahteraan anggota dapat mempengaruhi kinerja Satpol PP. Personel yang kompeten, profesional, dan memiliki motivasi tinggi adalah kunci keberhasilan pelaksanaan tugas.
- 7) Sarana dan Prasarana
Keterbatasan atau kondisi sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional yang sudah tidak layak pakai, peralatan penertiban, dan fasilitas pendukung lainnya dapat menghambat mobilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang kelancaran operasional Satpol PP.
- 8) Transparansi dan Akuntabilitas
Potensi penyalahgunaan wewenang dan kurangnya transparansi dalam tindakan penertiban dapat menurunkan kepercayaan publik, serta banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, serta transparansi dan akuntabilitas akan memastikan tindakan Satpol PP dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor yang Terkait dengan Isu Pelayanan Satpol PP adalah :

- 1) Regulasi dan Kebijakan
Kejelasan dan konsistensi Perda dan Perkada, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan Kepala Daerah sangat mempengaruhi efektivitas Satpol PP.
- 2) Anggaran
Ketersediaan anggaran yang memadai untuk operasional, pelatihan, dan pengadaan sarana prasarana menjadi faktor krusial.
- 3) Kepemimpinan
Visi dan komitmen pimpinan Satpol PP serta dukungan dari kepala daerah sangat menentukan arah dan kualitas pelayanan.
- 4) Kultur Organisasi

Budaya kerja, disiplin, dan etos kerja anggota Satpol PP mempengaruhi kinerja secara keseluruhan.

5) Partisipasi Masyarakat

Dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan Perda Perkada sangat membantu tugas Satpol PP.

6) Pengawasan

Pengawasan internal dan eksternal yang efektif dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas Satpol PP dalam menjalankan Tupoksinya.

7) Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pemantauan, pelaporan, dan koordinasi saat turun lapangan dengan instansi terkait atau pun Masyarakat.

8) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial dapat mempengaruhi tingkat pelanggaran Ketenteraman ketertiban umum serta Pelanggaran Perda dan Perkada di kota Batam

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang semula mempunyai target 601 menjadi 598 dengan anggaran Rp. 77.621.833.615 menjadi Rp. 55.706.610.429
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang semula di Renja Murni tidak ada target, dan direnja perubahan ada 12 Dokumen dengan anggaran tambahan Rp. 74.440.000.
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya mempunyai Target 1 Paket dengan Anggaran Rp. 359.999.000, dan Berubah menjadi 3 Paket dengan Anggaran Rp. 667.110.000,00
 - 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mempunyai target awal 3 orang dengan pagu Anggaran Rp. 14.136.000, dan berubah target menjadi 111 orang, dengan pagu anggaran Menjadi Rp. 623.922.000
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor renja murni Rp. 7.339.000 berubah menjadi 5.710.000,-
 - 2) Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor mempunyai targer 7 paket berubah menjadi 5 paket, dengan anggaran awal 61.067.000 menjadi 58.650.000
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mempunyai target 4 Paket menjadi 3 Pkaet dengan anggaran awal 62.576.000 menjadi 58.760.000
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan target 3 Paket menjadi 2 paket, dengan anggaran awal 34.592.000 menjadi 32.059.000
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan target awal 2 Dokumen menjadi 12 Dokumen.
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi awal pagu anggaran 121.935.000 menjadi 74.392.000
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pagu awal 866.230.000 menjadi 682.686.000
 - 2) Sub Kegiatan Mebel target awal 67 unit berubah menjadi 72 Unit, dengan pagu anggaran 271.578.000 menjadi 516.655.000,-

- 3) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya target awal 20 unit berubah menjadi 21 Unit, dengan pagu anggaran 135.022.000 menjadi 198.435.000
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik target awal 37 Laporan berubah menjadi 12 Laporan, dengan pagu anggaran 194.412.000 menjadi 205.740.000
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor target awal 12 Laporan berubah menjadi 12 Laporan, dengan pagu anggaran 166.965.120 menjadi 8.031.536.600
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan target awal 2 unit berubah menjadi 1 Unit, dengan pagu anggaran 80.760.000 menjadi 41.380.000
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan target awal 11 unit berubah menjadi 11 Unit, dengan pagu anggaran 135.450.000 menjadi 154.070.000
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya target awal 32 unit berubah menjadi 28 Unit, dengan pagu anggaran 23.680.000 menjadi 21.240.000
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya target awal 2 unit berubah menjadi 2 Unit, dengan pagu anggaran 20.600.000 menjadi 59.344.000
3. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota target awal 1 Dokumen berubah menjadi 12 Dokumen, dengan pagu anggaran 37.960.000 menjadi 1.368.000
 - 2) Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum target awal 1 Dokumen berubah menjadi 12 Dokumen, dengan pagu anggaran 23.120.000 menjadi 5.334.000
 - 3) Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum target awal 2 Dokumen berubah menjadi 12 Dokumen, dengan pagu anggaran 13.924.000 menjadi 850.000
 - 4) Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat target awal 10 Dokumen berubah menjadi 12 Dokumen, dengan pagu anggaran 12.155.000 menjadi 12.316.000
 - 5) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan Dasar Pol PP Fungsional pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional target awal 15 Orang berubah menjadi 5 Orang, dengan pagu anggaran 147.622.000 menjadi 17.236.000
 - 6) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat target awal 100 Orang berubah menjadi 12 Dokumen, dengan pagu anggaran 23.120.000 menjadi

- 15.580.000
- 7) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan target awal 100 Laporan berubah menjadi 12 Laporan, dengan pagu anggaran 1.453.900.000 menjadi 59.640.000
 - 8) Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa target awal 100 Laporan berubah menjadi 12 Laporan, dengan pagu anggaran 379.400.000 menjadi 864.100.000
 - 9) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah target awal 1 Laporan berubah menjadi 12 Laporan, dengan pagu anggaran 50.000.000 menjadi 50.000.000
 - 10) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum target awal 8 unit berubah menjadi 9 Unit, dengan pagu anggaran 376.860.000 menjadi 524.718.000
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 1) Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota target awal 3 Laporan berubah menjadi 12 Laporan, dengan pagu anggaran 14.388.000 menjadi 19.774.000
 - 2) Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah target awal 3 Laporan berubah menjadi 12 Laporan, dengan pagu anggaran 30.300.000 menjadi 1.236.185.300
 - 3) Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah target awal 14 Laporan berubah menjadi 12 Laporan, dengan pagu anggaran 130.800.000 menjadi 128.700.000
- c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS target awal 1 Laporan berubah menjadi 12 Laporan, dengan pagu anggaran 31.870.000 menjadi 62.284.000

Tabel 3.1
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					82.949.247.735	69.602.865.329	-13.346.382.406	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Nilai SAKIP PD	-	83	80.221.828.735	67.222.980.029	-12.998.848.706	
								Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-	87				
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	77.621.833.615	55.781.050.429	-21.840.783.186	
1	05	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	601 Orang	598 Orang	77.621.833.615	55.706.610.429	-21.915.223.186	
1	05	01	2.02.	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dolumen	0	74.440.000	74.440.000	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%		374.135.000	1.291.032.000	916.897.000	
1	05	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	3 Paket	359.999.000	667.110.000	307.111.000	
1	05	01	2.05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	3 orang	111 Orang	14.136.000	623.922.000	609.786.000	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	291.169.000	256.555.000	-34.614.000	
1	05	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.339.000	5.710.000	-1.629.000	
1	05	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5 Paket	61.067.000	58.650.000	-2.417000	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1	05	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	62.576.000	58.760.000	-3.816.000	
1	05	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	34.592.000	32.059.000	-2.533.000	
1	05	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000	3.600.000	0	
1	05	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	121.935.000	97.776.000	-24.159.000	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	100%	1.312.824.000	1.397.776.000	84.952.000	
1	05	01	2.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		866.230.000	682.686.000	-183.544.000	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1	05	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	67 Unit	72 Unit	271.578.000	516.655.000	245.077.000	
1	05	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	21 Unit	135.022.000	198.435.000	63.413.000	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	361.377.120	8.237.276.600	7.875.899.480	
1	05	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	12 Laporan	194.412.000	205.740.000	11.328.000	
1	05	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	166.965.120	8.031.536.600	-7.864.571.480	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	260.490.000	259.290.000	-1.200.000	
1	05	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	2 Unit	1 Unit	80.760.000	41.380.000	-39.380.000	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						
1	05	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	135.450.000	154.070.000	18.620.000	
1	05	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	28 Unit	23.680.000	21.240.000	-2.440.000	
1	05	01	2.09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	20.600.000	42.600.000	22.000.000	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	1. Persentase Capaian Strategi dalam Penyelenggaraa n trantibum	100%	100%	2.727.419.000	2.379.885.300	270.666.300	
							2. Persentase Penegakan Perda dan Perkada	2. Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan	100%	100%				

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
								Kapasitas SDM Satpol PP						
							3. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	3. Persentase Capaian Strategi dalam Penegakan Perda Perkada	100%	100%				
								4. Persentase Capaian Strategi, Peningkatan efektivitas Pelayanan dan Pemberdayaan SDM dalam Penyelenggaraa n Satlinmas		100%				
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang Ditangani	1. persentase pelanggaran dan pengaduan yang dapat diselesaikan	100%	100%	2.520.061.000	1.556.606.000	-968.919.000	
							2. Persentase Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	2. Persentase Satlinmas yang terlatih	100%	100%				
							3. Persentase Polisi Pamong Praja yang memenuhi standard kualifikasi	3. Persentase Polisi Pamong praja yang memenuhi standar kualifikasi	75%	63.54%				

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
							4. Warga Negara yang memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	4. Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%				
							5. Persentase Jenis Sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan	5. Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	100%				
1	05	02	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten dan kota	1 Dokumen	12 Dokumen	37.960.000	1.368.000	-36.592.000	
1	05	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan	1 Dokumen	12 Dokumen	23.120.000	13.930.000	-17.786.000	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
					Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum						
1	05	02	2.01	0006	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	12 Dolumen	13.924.000	850.000	-13.074.000	
1	05	02	2.01	0008	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10 Dokumen	12 Dokumen	12.155.000	6.048.000	161.000	
1	05	02	2.01	0010	Sub Kegiatan Peningkatan Kapastias SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan Dasar Pol PP Fungsional pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Sub Kegiatan Peningkatan Kapastias SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan Dasar Pol PP Fungsional pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Jumlah aparaturn Satpol pp yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja	15 Orang	5 Orang	147.622.000	30.618.000	-130.386.000	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1	05	02	2.01	0013	Sub Kegiatan Peningkatan Kapastias SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Sub Kegiatan Peningkatan Kapastias SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	12 Dokumen	23.120.000	5.334.000	-7.540.000	
1	05	02	2.01	0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100 Laporan	12 Laporan	1.453.900.000	59.640.000	-1.394.260.000	
1	05	02	2.01	0016	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100 laporan	12 Laporan	379.400.000	864.100.000	484.700.000	
1	05	02	2.01	0017	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	12 Laporan	50.000.000	50.000.000	0	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
					dan Peraturan Kepala Daerah	dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani							
1	05	02	2.01	0018	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	8 Unit	9 Unit	376.860.000	524.718.000	147.858.000	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda yang Ditindaklanjuti	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%		175.488.000	789.939.300	1.209.171.300	
1	05	02	2.02	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat /Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	3 Laporan	12 Laporan	14.388.000	19.774.000	5.386.000	
1	05	02	2.02	0011	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3 Laporan	12 Laporan	30.300.000	641.465.300	1.205.885.300	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
					dan Peraturan Kepala Daerah	dan Peraturan Kepala Daerah	dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP						
1	05	02	2.02	0012	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	14 Laporan	12 Laporan	130.800.000	128.700.000	-2.100.000	
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	Rasio PPNS Satpol PP	7.69%	6.63%	31.870.000	33.340.000	30.414.000	
1	05	02	2.03	0006	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	12 Laporan	31.870.000	33.340.000	30.414.000	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 -2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkan renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan

pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM

AMSAHAR ACHMAD

